

Internalisasi Nilai Sosiopolitik dalam Puisi “Sajak Sebatang Lisong” karya W.S. Rendra sebagai Sarana Pengembangan Literasi Kritis Siswa SMA : Kajian Sosiologi Sastra

Putri Balkis K¹, Julia Marfuah², Asman Asman³

^{1,3}Universitas Madako Tolitoli, Indonesia

²Universitas Tadulako, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Putri Balkis K

putribalkis612@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji internalisasi nilai sosiopolitik dalam puisi Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra dengan menempatkan teks sastra sebagai medium kritik sosial sekaligus sarana pengembangan literasi kritis siswa SMA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi representasi ketidakadilan sosial, kritik terhadap negara dan wacana hegemonik kekuasaan, serta pelanggaran hak asasi manusia yang merefleksikan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia, serta menjelaskan potensi internalisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologi sastra, khususnya strukturalisme-genetik, melalui teknik pembacaan kritis dan analisis isi terhadap struktur teks puisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sajak Sebatang Lisong merepresentasikan (1) ketidakadilan sosial akibat ketimpangan struktural antara kelompok elite dan masyarakat marjinal, (2) kritik terhadap negara yang mereproduksi wacana hegemonik untuk menutupi kegagalan kebijakan publik, serta (3) representasi implisit pelanggaran hak asasi manusia melalui penghilangan akses warga terhadap pendidikan, pekerjaan, dan martabat sosial. Selain itu, temuan penelitian menegaskan bahwa nilai-nilai sosiopolitik dalam puisi ini berpotensi terinternalisasi secara reflektif dan dialogis melalui praktik pembacaan kritis, sehingga berkontribusi terhadap penguatan literasi kritis, kesadaran sosial, dan sikap etis siswa SMA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa puisi karya W.S. Rendra tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetis dan representasi realitas sosial, tetapi juga sebagai medium pedagogis yang strategis dalam membangun kesadaran kritis dan refleksi kebangsaan dalam pembelajaran sastra.

Kata Kunci: sosiologi sastra; nilai sosiopolitik; internalisasi nilai; literasi kritis; *Sajak Sebatang Lisong*

Pendahuluan

Kajian mengenai nilai sosiopolitik dalam karya sastra Indonesia, khususnya puisi-puisi W.S. Rendra, tetap relevan di tengah meningkatnya ketimpangan sosial, ketegangan politik, dan krisis keadilan struktural yang masih berlangsung di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan nasional berada pada kategori moderat-tinggi dengan indeks gini yang stagnan pada kisaran 0,38–0,40 dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diiringi oleh distribusi kesejahteraan yang adil. Sejalan dengan itu, Komnas HAM (2022) mencatat peningkatan laporan pelanggaran hak sosial-ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan struktural, marginalisasi kelompok rentan, serta praktik kekuasaan yang merugikan warga negara. Situasi tersebut

menegaskan bahwa problem sosial-politik di Indonesia bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan persoalan struktural yang menuntut pembacaan kritis, termasuk melalui medium sastra.

Dalam konteks teori sastra, pendekatan sosiologi sastra memandang karya sastra sebagai produk sosial yang tidak terlepas dari kondisi historis dan struktur masyarakat tempat karya itu lahir. Muniroch, S. (2007) menegaskan bahwa sastra merupakan manifestasi dari fakta manusia, yakni tindakan subjek individual dan kolektif yang berakar pada kesadaran sosial tertentu. Karya sastra dengan demikian tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga mengekspresikan pandangan dunia (world view) kelompok sosial yang melahirkannya. Perspektif ini diperkuat oleh pemikiran Bourdieu yang menekankan relasi kuasa melalui konsep habitus, medan, dan modal, yang memungkinkan pembacaan sastra sebagai arena simbolik tempat kepentingan ideologis dan kekuasaan dinegosiasikan (Hidayat, S. 2017). Melalui kerangka ini, puisi tidak dipahami semata sebagai ekspresi estetis, melainkan sebagai praktik sosial yang memproduksi makna, resistensi, dan kritik terhadap struktur dominan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji nilai sosiopolitik dalam karya-karya W.S. Rendra. Tjahjono, T. (2012) menunjukkan bahwa puisi Rendra berfungsi sebagai bentuk keterlibatan sosial yang aktif dalam mengungkap persoalan ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Ayuningrum, S. (2021) mengidentifikasi bahwa puisi-puisi Rendra secara konsisten memusatkan perhatian pada isu kekuasaan politik, ideologi negara, kemiskinan struktural, dan praktik korupsi. Sementara itu, Anggraini, N. P., & Falah, F. (2024) menegaskan bahwa kritik sosial-politik dalam karya Rendra merupakan respons terhadap praktik represif pemerintahan Orde Baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan meminggirkan suara rakyat. Temuan-temuan tersebut mengonfirmasi bahwa puisi Rendra berfungsi sebagai wacana resistensi yang merepresentasikan penderitaan kolektif sekaligus perlawanan simbolik terhadap hegemoni kekuasaan.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada pemetaan nilai sosiopolitik dan kritik ideologis dalam teks sastra. Penelitian yang ada belum secara sistematis mengkaji bagaimana nilai-nilai sosiopolitik tersebut bekerja sebagai proses internalisasi kesadaran sosial, khususnya ketika puisi diposisikan dalam konteks pendidikan. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengaitkan analisis sosiologi sastra dengan pengembangan literasi kritis siswa sebagai tujuan pedagogis. Padahal, sastra memiliki potensi strategis sebagai media pembelajaran yang mampu membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap realitas sosial, relasi kuasa, dan ketidakadilan struktural yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memposisikan puisi Sajak Sebatang Lisong tidak hanya sebagai teks sastra yang merepresentasikan nilai sosiopolitik, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai tersebut dalam pengembangan literasi kritis siswa SMA. Pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk mengungkap bagaimana struktur teks puisi merepresentasikan kesadaran kolektif yang berakar pada konteks sosial-historis Indonesia, sekaligus menjelaskan potensi puisi sebagai medium pedagogis yang mendorong pembacaan kritis terhadap realitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sosiologi sastra dari analisis representasional menuju analisis transformatif yang menghubungkan teks, kesadaran sosial, dan praktik pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai sosiopolitik yang terkandung dalam puisi Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra melalui perspektif sosiologi sastra, serta (2) menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan sebagai sarana pengembangan literasi kritis siswa SMA. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana

nilai-nilai sosiopolitik dalam puisi Sajak Sebatang Lisong merepresentasikan kesadaran kolektif dan kritik sosial-historis, serta bagaimana nilai-nilai tersebut berpotensi diinternalisasikan untuk memperkuat literasi kritis siswa dalam pembelajaran sastra di sekolah menengah?

Penelitian ini menegaskan bahwa puisi-puisi Rendra melampaui batas ekspresi artistik semata dan berfungsi sebagai teks sosial transformatif yang memungkinkan peserta didik membangun kesadaran terhadap ketimpangan sosial, struktur hegemonik, serta kompleksitas politik yang membentuk kehidupan masyarakat Indonesia. Integrasi karya sastra semacam ini ke dalam kurikulum pembelajaran berpotensi memperkuat literasi kritis siswa dan menumbuhkan generasi yang lebih peka, reflektif, serta memiliki keberanian intelektual untuk mempertanyakan dan menantang ketidakadilan sosiopolitik di lingkungan sekitarnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis teks berbasis sosiologi sastra. Sosiologi sastra menempatkan karya sastra sebagai produk sekaligus kritik terhadap struktur sosial, sehingga memungkinkan pemahaman hubungan antara teks dan fenomena sosial. Data penelitian berupa kutipan larik, bait, dan baris yang bersumber dari puisi *Sajak Sebatang Lisong*. Data dikumpulkan melalui pembacaan mendalam dan *purposive sampling* untuk memilih bait-bait yang relevan dengan ketidakadilan sosial, kritik terhadap pemerintah, dan isu hak asasi manusia. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten yang meliputi langkah-langkah reduksi data, memilah, menyajikan, mengkategorisasikan tema, serta penarikan kesimpulan secara verifikatif dengan mencocokkan temuan analitis dengan teori dan riset terdahulu. Teknik pengumpulan serta analisis yang sistematis memungkinkan penelitian untuk menghasilkan interpretasi yang kontekstual, valid, dan relevan secara akademik, sehingga tidak hanya mendeskripsikan aspek estetis puisi tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial dan penelitian sebelumnya, menutup gap studi yang cenderung hanya berfokus pada aspek tekstual tanpa konteks sosiologis.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap representasi nilai sosiopolitik dalam puisi “Sajak Sebatang Lisong” karya W.S. Rendra yang dikaji melalui pendekatan sosiologi sastra, khususnya strukturalisme-genetik. Analisis difokuskan pada tiga kategori nilai utama yang ditemukan dalam teks, yakni (a) ketidakadilan sosial, (b) kritik terhadap pemerintah, dan (c) hak asasi manusia. Selain itu, hasil penelitian juga mencakup potensi internalisasi nilai-nilai tersebut sebagai penguatan literasi kritis siswa SMA. Secara keseluruhan, ditemukan enam data temuan yang terdistribusi secara proporsional pada ketiga kategori nilai di atas, sebagaimana tersaji pada diagram berikut.

Gambar 1 di bawah ini menunjukkan bahwa ketiga nilai sosiopolitik terdistribusi secara seimbang dengan masing-masing dua data temuan, yang mengindikasikan bahwa puisi “Sajak Sebatang Lisong” membangun kritik sosial secara menyeluruh dan proposional. Sementara itu, cincin dalam diagram memperlihatkan empat dimensi internalisasi pedagogis yang bersumber dari keseluruhan nilai sosiopolitik tersebut. Temuan-temuan ini diuraikan secara rinci pada bagian-bagian berikut.



Gambar 1. Diagram lingkaran distribusi nilai sosiopolitik dalam puisi “Sajak Sebatang Lisong” karya W.S. Rendra dan dimensi literasi kritis siswa SMA: (cincin luar) ketidakadilan sosial.

Data 1 & 2 (33,3%), kritik terhadap pemerintah , Data 3 & 4 (33,3%), hak asasi manusia , Data 5 & 6 (33,3%); (cincin dalam) empat dimensi internalisasi pedagogis: kesadaran sosial, analisis ideologis, dialog reflektif, dan transformasi sosial.

1. Nilai sosiopolitik dalam puisi “sajak sebatang lisong” karya ws. Rendra

a. Ketidakadilan Sosial

Puisi Sajak Sebatang Lisong membangun gambaran ketidakadilan sosial melalui citraan keras yang menyoroti dominasi elite atas rakyat kecil. Kritik tersebut diwujudkan lewat metafora yang ekstrem yang menegaskan posisi masyarakat sebagai pihak terpinggirkan. Hal ini tampak pada data kutipan puisi berikut.

Data 1

*“cukong mengganggu ...
berak di atas kepala mereka”*

Penggunaan ketimpangan sosial dengan metafora kasar ini secara sadar digunakan untuk menggambarkan kesewenangan elite ekonomi (“cukong”) yang menikmati kekuasaan tanpa memedulikan penderitaan rakyat. Dalam kerangka sosiologi sastra, ini memperlihatkan struktur kelas yang timpang dengan minoritas pemilik modal mendominasi mayoritas yang miskin. Lebih jauh, Rendra juga menyoroti hilangnya akses rakyat terhadap kebutuhan dasar. Hal ini tampak pada kutipan berikut:

Data 2

*"Aku melihat delapan juta kanak-kanak
tanpa pendidikan."*

*"Aku melihat sarjana-sarjana mengganggu
berpeluh di jalan raya."*

Kutipan tersebut mengandung kritik terhadap kegagalan negara menjamin pendidikan dan lapangan kerja yang layak. Rakyat kecil digambarkan sebagai kelompok yang terus-menerus berada dalam posisi rentan. Watak realis puisi ini memperkuat argumen bahwa ketidakadilan bukan sekadar hasil kemalasan individu, tetapi konsekuensi dari sistem sosial yang tidak berpihak pada rakyat.

Ketimpangan ekonomi di Indonesia pada dasarnya merupakan persoalan sistemik yang berakar pada dinamika kekuatan struktural, bukan sekadar kegagalan moral individu. Hal ini didukung oleh Nirwana dkk. (2022) menunjukkan bagaimana oligarki ekonomi bekerja melalui jaringan modal politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan pada kelompok elit minoritas. Selanjutnya diperkuat oleh Kusuma dkk. (2025) yang menegaskan bahwa ketidakadilan ekonomi muncul dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang mengakar kuat, termasuk bagaimana sistem hukum dan kebijakan ekonomi turut melanggengkan ketidaksetaraan, serta gagasan oleh Daniel dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan lebih dipicu oleh disparitas ekonomi struktural daripada kekurangan atau moralitas individu.

Di sisi lain puisi berfungsi sebagai tindakan sosial yang membangun kesadaran terhadap ketimpangan. Tjahjono, T. (2012) menegaskan bahwa puisi dapat menjadi "tindakan" yang mengangkat isu sosial, sementara Pratiwi dkk. (2019) mencatat bahwa Rendra menggunakan puisi untuk menggambarkan kemiskinan dan kesewenang-wenangan pemerintah. Indrastuti, N. S. K. (2019) menambahkan bahwa puisi juga menjadi media kritik terhadap ketidaksetaraan ekonomi, politik, dan moral. Temuan ini diperkuat oleh Anggraini, N. P., & Falah, F. (2024) yang menunjukkan bahwa Rendra secara strategis memakai citra sastra untuk menantang penindasan struktural sehingga puisi rendra konsisten dengan melihat ketimpangan sosial sebagai hasil relasi kuasa yang tidak seimbang dalam sistem ekonomi-politik Indonesia.

b. Kritik Terhadap Pemerintah

Selain memotret ketimpangan sosial, puisi ini juga mengungkap bagaimana kekuasaan membentuk wacana tentang rakyat melalui bahasa yang merendahkan. Rendra menampilkan konstruksi naratif penguasa yang memosisikan masyarakat sebagai objek yang dianggap tidak cakap dan perlu "dibentuk" ulang. Kritik paling jelas muncul ketika penyair menirukan suara teknokrat penguasa tampak pada kutipan berikut:

Data 3

*"Para teknokrat berkata:
bahwa bangsa kita adalah malas,
bahwa bangsa mesti dibangun,
mesti di-upgrade."*

Narasi “bangsa malas” merupakan bentuk wacana hegemonik. Pemerintah melemparkan kesalahan kepada rakyat sekaligus membenarkan proyek pembangunan yang tidak melibatkan mereka. Kritik Rendra tegas rakyat disalahkan, sementara struktur sosial yang timpang tidak disentuh. Rendra kemudian mengajukan solusi tandingan. Hal ini nampak pada data kutipan puisi berikut.

Data 4

*“Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing.
Diktat-diktat hanya boleh memberi metode,
tetapi kita sendiri merumuskan keadaan.”*

Kutipan ini menunjukkan perlawanan terhadap ketergantungan pada kebijakan impor dan pembangunan yang tidak *grounded* pada realitas rakyat. Deskripsi semacam ini menunjukkan bagaimana negara membangun legitimasi kebijakan dengan menormalisasi kegagalan struktural sebagai kelemahan moral warga. Sebuah pola dalam analisis politik kontemporer dipahami sebagai bentuk hegemoni diskursif. Rajab, B (2004) menyoroti bagaimana model pembangunan rezim Orde Baru ditandai oleh kebijakan liberal yang terutama menguntungkan bisnis besar sambil mengabaikan pelaku ekonomi kecil. Temuan ini juga diperkuat oleh Yusuf dkk. (2024) yang menggambarkan sistem oligarki di mana elit penguasa menggunakan struktur pemerintahan sebagai alat untuk mendominasi dan mengendalikan rakyat, sehingga kesejahteraan dan keadilan sulit tercapai. Interpretasi tersebut selaras dengan pola yang ditunjukkan kedua penelitian ini bahwa narasi pembangunan sering menempatkan rakyat sebagai pihak pasif dan digunakan untuk menutupi relasi kuasa oligarkis yang memusatkan kendali ekonomi dan politik pada kelompok elite sebuah mekanisme struktural yang memastikan keberlanjutan dominasi mereka.

Terdapat penelitian yang juga mengonfirmasi dan memberikan bukti terkait kritik terhadap pemerintah dalam karya sastra dalam puisi. Beding, BT., (2015) memberikan bukti konkret dari pendekatan ini, menunjukkan bagaimana puisi Rendra “Sajak Seonggok Jagung” mengungkap ketidaksetaraan pendidikan yang kritis, termasuk kesenjangan antara pendidikan perkotaan dan pedesaan, serta kesenjangan sosial ekonomi. Secara lebih spesifik, Rendra mengungkap ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri dan teknologi impor, menyoroti bagaimana ketergantungan tersebut memperlemah kapasitas nasional dan menempatkan Indonesia dalam struktur ekonomi global yang timpang (Lutfi, M. 2020). Melalui kritik terhadap model pembangunan *top-down*, Rendra menegaskan bahwa kebijakan negara kerap meminggirkan inisiatif lokal dan melanggengkan ketimpangan sistemik, sehingga puisinya berfungsi sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap relasi kuasa dan pembangunan elit yang tidak berpihak pada rakyat.

c. Hak Asasi Manusia

Tema HAM dalam puisi ini muncul melalui penegasan mengenai martabat manusia dan hak-hak dasar yang terabaikan. Walau tidak menyebut “hak asasi manusia” secara eksplisit. Puisi ini juga berisi berbagai bentuk pelanggaran hak dasar, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesejahteraan, dan hak untuk bersuara.

Pernyataan penyair mengenai nilai seni dan pemikiran memperjelas urgensi tersebut. Seperti yang tertuang dalam bait berikut.

Data 5

*"Apakah artinya kesenian
bila terpisah dari derita lingkungan?
Apakah artinya berpikir
bila terpisah dari masalah kehidupan?"*

Bait ini menegaskan bahwa seni harus berfungsi sosial membela mereka yang hak-haknya dirampas. Gambaran kondisi sosial ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak fundamental, terutama hak atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Dalam kerangka sosiologi sastra, Rendra mengangkat Hak Asasi Manusia sebagai konsekuensi langsung dari struktur ketimpangan dan kebijakan negara yang timpang. Putra, A, (2022) menekankan bahwa hak asasi manusia di Indonesia berakar pada ideologi Pancasila, yang menunjukkan hubungan erat antara kerangka politik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Hal ini diperkuat oleh Abdillah dkk., (2024) bahwa penempatan pemahaman Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam konteks budaya spesifik yang menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab kolektif. Di sisi lain terdapat juga gambaran Hak Asasi Manusia yang menegaskan keadaan rakyat. Hal ini nampak pada kutipan puisi berikut.

Data 6

*"Inilah sajakku.
Pamflet masa darurat."*

Pada bait tersebut Renra menegaskan bahwa keadaan rakyat adalah keadaan krisis sebuah situasi darurat kemanusiaan. Penyair menempatkan dirinya sebagai saksi dan penyampai suara mereka yang tidak dapat berbicara dalam struktur kekuasaan yang represif. Zakarias dkk., (2021) semakin memperkuat pernyataan ini bahwa puisi menjadi media kritis untuk mengekspresikan keresahan masyarakat, terutama seputar krisis politik, ekonomi, dan sosial. Para penyair pada dasarnya mengubah karya mereka menjadi intervensi etis, menyuarakan mereka yang terbungkam dalam struktur kekuasaan yang represif.

2. Internalisasi Nilai Sosiopolitik dalam Puisi Sajak Sebatang Lisong sebagai Penguatan Literasi Kritis Siswa SMA

Temuan-temuan yang telah diuraikan pada bagian Hasil menunjukkan bahwa puisi "Sajak Sebatang Lisong" karya W.S. Rendra bukan sekadar karya estetis, melainkan teks sosial yang merepresentasikan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia dalam konteks sosial-historis Orde Baru. Bagian ini mendiskusikan secara kritis ketiga kategori nilai sosiopolitik yang ditemukan serta mengkaji implikasi pedagogisnya bagi penguatan literasi kritis siswa SMA, dengan mengacu pada teori sosiologi sastra dan pedagogi kritis yang relevan.

Ketidakadilan Sosial sebagai Representasi Ketimpangan Struktural

Temuan pada Data 1 dan Data 2 mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial dalam puisi Rendra bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan representasi sistemik dari relasi kelas yang timpang. Metafora keras pada Data 1 mengungkap relasi asimetris antara kelompok pemilik modal dan kelompok marjinal yang dimiskinkan secara struktural. Dalam perspektif sosiologi sastra, relasi ini mencerminkan ketidakseimbangan modal ekonomi, sosial, dan budaya yang mereproduksi dominasi melalui habitus dan medan sosial yang tidak setara. Ketidakadilan ini juga berkaitan erat dengan cara oligarki ekonomi bekerja melalui jaringan modal politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan pada kelompok elite minoritas, sebagaimana tercermin dalam praktik politik Orde Baru yang menempatkan elite penguasa dalam posisi dominasi melalui struktur pemerintahan (Arizal, 2022). Lebih jauh, ketidakadilan ekonomi tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang mengakar, termasuk dalam sistem hukum dan kebijakan negara yang pada masa Orde Baru memacu pembangunan ekonomi sambil membatasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Wajdu, 2019). Data 2 memperkuat argumen tersebut dengan menghadirkan fakta kemiskinan pendidikan dan pengangguran struktural sebagai bukti kegagalan negara, bukan sebagai akibat dari kelemahan moral individu, sebuah posisi yang konsisten dengan kritik terhadap narasi kemiskinan berbasis moralitas individual. Kondisi ketimpangan semacam ini termanifestasi secara konkret dalam perbedaan akses pendidikan dan pelayanan dasar antara kelompok masyarakat, di mana negara seringkali abai terhadap hak-hak kelompok marjinal (Priyono, 1970).

Puisi Rendra dalam hal ini berfungsi sebagai tindakan sosial yang mengangkat isu ketimpangan ke ranah publik. Karya sastra dalam konteks Orde Baru memang berfungsi sebagai wacana perlawanan terhadap arus utama yang dibangun oleh rezim berkuasa untuk mengukuhkan status quo (Nurhadi, 2016). Rendra secara strategis menggunakan citra sastra untuk menantang penindasan struktural, sehingga puisinya secara konsisten memposisikan ketimpangan sebagai hasil relasi kuasa yang tidak seimbang dalam sistem ekonomi-politik Indonesia, sebagaimana juga ditunjukkan oleh karya-karya sastra lain yang turut memperlemah posisi legitimasi Orde Baru (Susanto, 2017).

Kritik terhadap Pemerintah sebagai Pembongkaran Wacana Hegemonik

Data 3 dan Data 4 memperlihatkan dimensi kritik Rendra yang paling eksplisit, yakni pembongkaran wacana hegemonik yang digunakan negara untuk melegitimasi dominasi atas rakyat. Narasi "bangsa malas" pada Data 3 merepresentasikan mekanisme pengalihan tanggung jawab, di mana negara mengalihkan kegagalan struktural kepada rakyat melalui bahasa kebijakan yang tampak netral namun sarat muatan ideologis. Model pembangunan Orde Baru memang ditandai oleh kebijakan yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sambil mengebiri kekuatan-kekuatan politik yang dianggap mengganggu eksistensi kekuasaan, sehingga menciptakan ilusi kemajuan di balik realitas ketimpangan yang semakin dalam (Nurhadi, 2016), (Susanto, 2017).

Kondisi ini dipertegas oleh cara sistem oligarki menempatkan elite penguasa dalam posisi yang memungkinkan mereka menggunakan struktur pemerintahan sebagai alat dominasi. Rezim Orde Baru berada pada posisi kekuatan yang tidak tertandingi, di mana sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dianggap melawan negara (Samosir et al., 2022). Data 4 merespons kondisi ini dengan menghadirkan kritik terhadap ketergantungan pada rumus kebijakan impor yang tidak membumi pada realitas rakyat. Kesenjangan semacam ini termanifestasi secara konkret dalam perbedaan akses pendidikan dan pelayanan publik sebagai bentuk nyata dari model pembangunan top-

down yang gagal, di mana hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara tidak terpenuhi secara memadai (Wajdu, 2019; , Priyono, 1970). Dengan demikian, kedua data ini secara bersama-sama merepresentasikan hegemoni diskursif sebagai praktik kekuasaan yang bekerja melalui bahasa dan wacana, sejalan dengan temuan bahwa karya sastra dapat melakukan praktik kritik sosial dan pewacanaan yang berlawanan dengan wacana dominan yang didesakkan oleh rezim berkuasa (Nurhadi, 2016).

Hak Asasi Manusia sebagai Intervensi Etis dalam Teks Sastra

Data 5 dan Data 6 memperkuat argumen bahwa puisi "Sajak Sebatang Lisong" merupakan teks HAM implisit yang menempatkan seni sebagai bentuk keberpihakan etis. Pertanyaan retorik pada Data 5 bukan sekadar pernyataan estetis, melainkan deklarasi moral yang menolak pemisahan antara praktik seni dan tanggung jawab sosial. Hak asasi manusia di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam kerangka konstitusional dan ideologis nasional, di mana HAM dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara (Gusmian, 2016). Perspektif ini dilengkapi dengan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif dalam sistem sosial yang adil, sebagaimana tercermin dalam konsepsi HAM yang tidak hanya mencakup hak sipil dan politik tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya (Wajdu, 2019; , Gusmian, 2016).

Data 6 mengukuhkan posisi penyair sebagai saksi etis dalam struktur kekuasaan yang represif. Puisi dalam konteks ini berfungsi sebagai media kritis yang menyuarakan mereka yang terbungkam, sebagaimana karya sastra pada masa Orde Baru turut memberi andil dalam membentuk kesadaran pembaca akan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara (Susanto, 2017). Lemahnya jaminan konstitusi pada masa Orde Baru menjadikan berbagai hak asasi warga seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat menjadi terbatas dan dapat dirampas kapan saja (Oktiaputri, 2023). Hal ini menempatkan puisi bukan hanya sebagai dokumen budaya, tetapi sebagai praktik pembebasan simbolik yang membuka ruang bagi kesadaran kritis pembacanya. Upaya pendidikan HAM (*human rights education*) menjadi mutlak diperlukan untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran HAM dalam proses pembelajaran (Bakar & Sastrawati, 2021).

Internalisasi Nilai Sosiopolitik sebagai Penguatan Literasi Kritis Siswa SMA

Temuan penelitian ini tidak berhenti pada representasi nilai sosiopolitik dalam teks, melainkan menjangkau dimensi pedagogis dari internalisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks pembelajaran sastra. Dari perspektif sosiologi sastra, puisi "Sajak Sebatang Lisong" berfungsi sebagai wacana tandingan terhadap narasi dominan. Ketika siswa mengaitkan tema puisi dengan pengalaman sosial mereka, terjadi praktik kesadaran kritis (*critical consciousness*) di mana pembacaan sastra bertransformasi menjadi alat untuk mengkritisi struktur sosial. Sastra memang memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap relasi kuasa, sebagaimana ditunjukkan oleh peran karya fiksi dalam membentuk kesadaran pembaca akan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat negara (Susanto, 2017).

Bahasa yang lugas dan ironis dalam puisi Rendra secara khusus melatih kemampuan analisis ideologis siswa, yakni kemampuan mendeteksi kepentingan ideologis di balik representasi sosial. Proses ini menempatkan siswa sebagai pembaca aktif yang membaca teks sebagai praktik sosial. Dalam kerangka pedagogi kritis, hal ini memungkinkan siswa menjadi subjek aktif dalam pembentukan makna, sejalan dengan konsep *official knowledge* yang dapat dialihkan menjadi sikap penerimaan dan

penyadaran akan fakta kemajemukan serta ketimpangan sosial (Arifin et al., 2018). Pembelajaran bahasa Indonesia sendiri secara kurikuler telah diarahkan untuk mengembangkan kemampuan literasi yang mencakup kemampuan berbahasa, sastra, dan bernalar kritis-kreatif (Wardaya, 2012).

Pembelajaran berbasis puisi ini mendorong dialog interaktif antara teks, konteks sosial, dan pengalaman pribadi siswa, yang mengembangkan keberanian intelektual untuk mempertanyakan hegemoni. Internalisasi nilai dalam puisi Rendra dengan demikian bersifat emansipatoris, memberi siswa kebebasan untuk membentuk pemahaman mereka sendiri tentang realitas sosial. Integrasi karya sastra bernilai sosiopolitik ke dalam kurikulum berpotensi membentuk generasi yang lebih reflektif, peka, dan berdaya kritis, sebagaimana pendidikan HAM melalui kurikulum dipandang mampu meningkatkan kesadaran kewarganegaraan demokratis (Bakar & Sastrawati, 2021).

Secara sintetik, temuan penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai sosiopolitik yang teridentifikasi pada ketiga kategori, ketidakadilan sosial, kritik terhadap pemerintah, dan hak asasi manusia, tidak berhenti sebagai representasi tematik dalam teks, melainkan berfungsi sebagai sumber internalisasi kesadaran kritis dalam konteks pembelajaran sastra. Melalui pendekatan sosiologi sastra dan pedagogi kritis, puisi "Sajak Sebatang Lisong" terbukti mampu menjembatani pemahaman siswa dari pengenalan masalah sosial menuju praktik literasi kritis yang reflektif, dialogis, dan emansipatoris, sebuah potensi pedagogis yang perlu dioptimalkan secara sistematis dalam kurikulum bahasa dan sastra Indonesia di jenjang SMA.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra merepresentasikan kritik sosiopolitik yang sistemik melalui tiga temuan utama, yakni penggambaran ketidakadilan sosial akibat ketimpangan struktural antara elite dan kelompok marjinal, kritik terhadap negara yang mereproduksi wacana hegemonik untuk menutupi kegagalan kebijakan publik, serta representasi implisit pelanggaran hak asasi manusia melalui penghilangan akses warga terhadap pendidikan, pekerjaan, dan martabat sosial. Temuan ini menegaskan bahwa puisi tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai ekspresi estetis, melainkan sebagai teks politis yang merefleksikan kesadaran kolektif masyarakat dan berfungsi sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap dominasi struktural dalam konteks sosial-historis Indonesia.

Dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra di SMA, nilai-nilai sosiopolitik yang terkandung dalam puisi ini memiliki potensi kuat untuk terinternalisasi melalui praktik pembacaan kritis yang reflektif dan dialogis. Proses internalisasi nilai berlangsung bukan melalui mekanisme indoktrinatif, melainkan melalui aktivitas interpretatif yang mendorong siswa mengaitkan struktur teks sastra dengan realitas sosial yang mereka alami. Melalui proses tersebut, siswa tidak hanya mengembangkan pemahaman apresiatif terhadap puisi sebagai karya bahasa, tetapi juga membangun literasi kritis, kesadaran sosial, serta sikap etis terhadap ketidakadilan dan relasi kuasa yang bekerja dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Sajak Sebatang Lisong dapat diposisikan sebagai medium pedagogis strategis dalam membentuk subjek pembelajar yang reflektif, kritis, dan peka terhadap isu-isu sosiopolitik, sejalan dengan orientasi pendidikan sastra yang emansipatoris dan transformatif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu teks puisi sebagai objek kajian, sehingga generalisasi temuan terhadap keseluruhan karya W.S. Rendra maupun praktik pembelajaran sastra di berbagai konteks pendidikan masih

terbatas. Selain itu, penelitian ini belum dilengkapi dengan data empiris pembelajaran di kelas, seperti respons siswa atau praktik pedagogis guru, sehingga proses internalisasi nilai sosiopolitik masih dikaji pada tataran konseptual-teoretis. Kendati demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan memperluas kajian sosiologi sastra ke ranah pedagogis melalui integrasi analisis teks, internalisasi nilai, dan penguatan literasi kritis. Studi ini menegaskan bahwa sastra tidak hanya berfungsi sebagai representasi realitas sosial, tetapi juga sebagai medium edukatif yang berpotensi membentuk kesadaran kritis siswa, sehingga memperkaya diskursus akademik mengenai peran sastra dalam pendidikan yang berorientasi pada transformasi sosial dan pembentukan warga negara yang reflektif dan berdaya kritis.

Referensi

- Abdillah, I., Tanjung, N. A., Puspita, A. A., Aqilah, A. N., & Khalifah, Y. (2024). Pancasila sebagai pedoman dasar dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 57–63. <https://doi.org/10.36985/k6v8ap16>
- Albers, P., Pace, C. L., & Odo, D. M. (2016). From affinity and beyond: A study of online literacy conversations and communities. *Journal of Literacy Research*, 48(2), 221–250. <https://doi.org/10.1177/1086296X16659069>
- Anggraini, N. P., & Falah, F. (2024). Kritik sosial pada puisi “Aku tulis pamflet ini” karya W. S. Rendra dan puisi “Peringatan” karya Wiji Thukul (Pendekatan sastra bandingan). *Wicara: Jurnal Sastra, Bahasa, dan Budaya*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/10.14710/wjsbb.2024.22558>
- Arifin, S., Muthohirin, N., Tongat, T., & Wahyudi, W. (2018). Interseksi hak asasi manusia dan Shari’ah di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), 279–305. <https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.261-287>
- Arizal, J. (2022). Pertarungan diskursif Islam politik dalam wacana penerapan syariat Islam pasca Orde Baru. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 84. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31920>
- Ayuningrum, S. (2021). Kritik sosial potret pembangunan dalam puisi karya W. S. Rendra. *Jurnal Metamorfosa*, 9(1), 69–81. <https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v9i1.1339>
- Bakar, A., & Sastrawati, N. (2021). Dilema kewargaan kelompok minoritas: Studi kasus Suku Bajo di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(2). <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1306>
- Beding, B. T. (2015). Potret kesenjangan pendidikan dalam puisi “Sajak Seonggok Jagung” karya W. S. Rendra. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 7(2), 216–231. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v7i2.37>
- Behrman, E. H. (2006). Teaching about language, power, and text: A review of classroom practices that support critical literacy. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 49(6), 490–498. <https://doi.org/10.1598/JAAL.49.6.4>
- Ewaida, M., Gaffney, K., & Garcia, F. (2017). Critical partnerships in literacy. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 61(1), 95–98. <https://doi.org/10.1002/jaal.646>
- Fredricks, L. (2012). The benefits and challenges of culturally responsive EFL critical literature circles. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 55(6), 494–504. <https://doi.org/10.1002/jaal.00059>

- Gusmian, I. (2016a). Tafsir Al-Qur'an dan kritik sosial: Syubah Asa dalam dinamika tafsir Al-Qur'an di Indonesia. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2), 67–80. <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.741>
- Gustine, G. G., & Insani, H. N. (2019). Pengalaman mahasiswa Bahasa Inggris dalam menyusun ulang cerita naratif dari perspektif literasi kritis. *Jurnal Linguistik Terapan Indonesia*, 8(3), 691–696. <https://doi.org/10.17509/ijal.v8i3.15254>
- Hidayat, S. (2010). Teori sosial Pierre Bourdieu dan sumbangannya terhadap penelitian sastra. *Metasastra: Jurnal Penelitian Sastra*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.26610/metasastra.2010.v3i1.43-52>
- Indrastuti, N. S. K. (2019). Nasionalisme dalam bingkai kritik sosial: Kajian sosio-pragmatik terhadap puisi Indonesia modern. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 7(1), 105–118. <https://doi.org/10.22146/poetika.v7i1.45421>
- Kohnen, A. M., & Mertens, G. E. (2019). "I'm always kind of double-checking": Exploring the information-seeking identities of expert generalists. *Reading Research Quarterly*, 54(3), 279–297. <https://doi.org/10.1002/rrq.245>
- Komnas HAM. (2022). *Laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2022*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/0e01938fc48a2cfb5f2228517fbfb00722d
- Kusuma, A. K. P., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). Antara optimalisasi dan kontradiksi: Telaah ambivalensi efisiensi anggaran tahun 2025 dalam perencanaan pembangunan nasional. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 998–1008. <https://doi.org/10.54783/jser.v7i1.872>
- Lewis, C. (2000). Critical issues: Limits of identification: The personal, pleasurable, and critical in reader response. *Journal of Literacy Research*, 32(2), 253–266. <https://doi.org/10.1080/10862960009548076>
- Lutfi, M. (2020). Analisis puisi "Maskumambang" karya W. S. Rendra melalui kajian semiotika Riffaterre. *Nuansa Indonesia*, 22(1), 31–48. <https://doi.org/10.20961/ni.v22i1.44258>
- Morales-Doyle, D. (2017). Justice-centered science pedagogy: A catalyst for academic achievement and social transformation. *Science Education*, 101(6), 1034–1060. <https://doi.org/10.1002/sce.21305>
- Morrell, E. (2009). Critical research and the future of literacy education. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 53(2), 96–104. <https://doi.org/10.1598/JAAL.53.2.1>
- Muniroch, S. (2007). Understanding genetic structuralism from its basic concept. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 2(1). <https://doi.org/10.18860/ling.v2i1.560>
- Nash, K. T., & Miller, E. T. (2014). Reifying and resisting racism from early childhood to young adulthood. *The Urban Review*, 47(1), 184–208. <https://doi.org/10.1007/s11256-014-0314-5>
- Novianti, N., Thomas, A., & To, V. (2020). Addressing challenges in the practice of critical literacy in EFL classrooms: A new framework. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 10(1). <https://doi.org/10.17509/ijal.v10i1.25049>
- Nurhadi, N. (2016). Aspek kekerasan sebagai refleksi dan formatif kondisi sosial politik di eks-Timor Timur dalam *Jazz Parfum & Insiden* karya Seno Gumira Ajidarma. *Litera*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/ltr.v7i1.4877>
- Oktiaputri, A. (2023). Analisis wacana kritis model Van Dijk terhadap berita online "Gaduh PeduliLindungi dituding melanggar hak asasi manusia, ada apa?". *Semantik*, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.22460/semantik.v12i1.p1-20>

- Palmer, M. M., & Hirsch, J. S. (2022). Putting the “comprehensive” in comprehensive sexuality education: A review exploring young adult literature as a school-based intervention. *Sexuality Research and Social Policy*, 19(4), 1867–1878. <https://doi.org/10.1007/s13178-022-00699-7>
- Pratiwi, D. A., Safitri, I., & Farika, L. (2019). Kritik sosial dalam kumpulan puisi W. S. Rendra: Kehidupan masyarakat di Indonesia. *Cakrawala Linguista*, 1(2), 59–67. <https://doi.org/10.26737/cling.v1i2.874>
- Priyono, A. (1970). Islam dalam oposisi demokratis di Indonesia. *Studia Islamika*, 2(4). <https://doi.org/10.15408/sdi.v2i4.826>
- Putra, A. (2022). Interpretasi HAM dalam ideologi Pancasila dan implikasinya terhadap persatuan dan kesatuan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14>
- Rajab, B. (2004). Negara Orde Baru: Berdiri di atas sistem ekonomi dan politik yang rapuh. *Sosiohumaniora*, 6(3), 182–190. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5528>
- Roy, L. (2017). “So what's the difference?” Talking about race with refugee children in the English language learner classroom. *TESOL Journal*, 8(3), 540–563. <https://doi.org/10.1002/tesj.286>
- Samosir, A. R., Sianturi, R. P., & Kakunsi, E. (2022). Gereja dan krisis kebebasan beragama di Indonesia. *Kurios*, 8(2). <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.583>
- Souto-Manning, M. (2009). Negotiating culturally responsive pedagogy through multicultural children's literature: Towards critical democratic literacy practices in a first grade classroom. *Journal of Early Childhood Literacy*, 9(1), 50–74. <https://doi.org/10.1177/1468798408101105>
- Susanto, M. (2017). Wacana menghidupkan kembali GBHN dalam sistem presidensial Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 427–445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.427-445>
- Tjahjono, T. (2012). Melawan kekuasaan dengan puisi. *Atavisme*, 15(1), 49–58. <https://doi.org/10.24257/atavisme.v15i1.47.49-58>
- Torres, F. L., & Pytash, K. E. (2023). Down but not out: Using restorying to imagine beyond the constraints of mandated texts for critical thinking, empathy, and identity work. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 67(3), 175–185. <https://doi.org/10.1002/jaal.1315>
- Wajdu, F. (2019). Pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam kerangka hak azasi manusia. *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 4(2), 137–160. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.766>
- Wardaya, M. K. (2012). Keadilan bagi yang berbeda paham: Rekonsiliasi dan keadilan bagi korban tragedi 1965. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 96–112. <https://doi.org/10.22146/jmh.16211>
- Washington, A. R. (2021). Using a critical hip-hop school counseling framework to promote Black consciousness among Black boys. *Professional School Counseling*, 25(1_part_4), 2156759X211040039. <https://doi.org/10.1177/2156759X211040039>
- Zakarias, V. C., Athira, S., & Azmin, G. G. (2021). Kritik sosial dalam puisi “Dari Catatan Seorang Demonstan” (Taufiq Ismail) dan puisi “Sikap” (Wiji Thukul). *Seulas Pinang: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 3(2), 18–24. <https://doi.org/10.30599/spbs.v3i2.1068>